

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

##### **4.1.1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Tingginya Angka Fakir Miskin di Kota Semarang**

1. Berdasarkan pada hasil analisis di bab sebelumnya, tahapan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi fakir miskin di Kota Semarang dikaji dengan melalui tiga tahapan pemberdayaan oleh Sulistiyani (2017), yakni tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, serta tahap peningkatan kemampuan intelektual.
2. Berdasarkan pada hasil analisis di bab sebelumnya, pelaksanaan tahapan pemberdayaan menunjukkan bahwa adanya proses penyadaran telah mendorong masyarakat untuk dapat memahami kondisi kemiskinan yang dialami, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar serta pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Masyarakat mulai mengenali potensi diri yang dapat dikembangkan melalui beberapa usaha kecil dan kegiatan kelompok, dan memanfaatkan ruang pendampingan yang diberikan dan pertemuan rutin sebagai sarana diskusi dan pembelajaran.

Pada tahap transformasi kemampuan, adanya pelatihan keterampilan dan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat terlibat dalam aktivitas produktif seperti usaha kuliner, kerajinan, dan peternakan, sehingga sebagian masyarakat dapat mampu menghasilkan pemasukan tambahan dan menunjukkan transisi

dari penerima bantuan menuju pelaku usaha skala kecil. Pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, terdapat perubahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama dalam memprioritaskan penggunaan bantuan untuk pendidikan anak dan kebutuhan pokok, serta munculnya keberanian untuk dapat merencanakan usaha dan mempertimbangkan peluang pasar.

3. Terdapat beberapa hal penting yang masih diperlukan upaya penguatan dalam tahapan pemberdayaan. Pada tahap penyadaran, pemahaman masyarakat masih banyak diartikan sebagai kondisi kekurangan yang perlu dibantu melalui program sosial sehingga fokus utamanya terhadap bantuan jangka pendek masih terlihat serta kesadaran mengenai strategi untuk keluar dari kemiskinan masih belum terbentuk secara penuh dan merata.

Pada tahap transformasi kemampuan, penerapan keterampilan yang dilakukan masih belum diterapkan secara konsisten karena masih terdapat kendala dalam pengelolaan usaha, pemasaran produk, pencatatan keuangan, dan dinamika internal kelompok yang memengaruhi keberlanjutan usaha yang berpengaruh pada sebagian kegiatan masih bergantung pada pendampingan eksternal. Pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, beberapa perencanaan usaha yang dilakukan masih bersifat sederhana dan pemahaman mengenai pemisahan modal dan keuntungan belum terinternalisasi secara konsisten, sehingga upaya pengembangan usaha secara sistematis dan jangka panjang belum menjadi praktik yang umum di seluruh penerima manfaat.

#### **4.1.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Fakir Miskin**

1. Berdasarkan pada hasil analisis di bab sebelumnya, pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi fakir miskin di Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, keadaan kelembagaan, sarana dan prasarana, kebijakan, serta organisasi dan administrasi.
2. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang mendukung proses pemberdayaan yang dilakukan. Pada faktor sumber daya alam, tersedia potensi lokal di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dan telah disesuaikan dengan karakteristik wilayah melalui pembentukan kelompok usaha. Pada faktor sumber daya manusia, terdapat motivasi masyarakat yang didorong oleh kebutuhan keluarga dan harapan kepada pendidikan anak, serta adanya peningkatan pengetahuan melalui pemberian pelatihan dan pendampingan. Pada faktor kelembagaan, struktur pendampingan berjalan secara berjenjang melalui Dinas Sosial, pendamping PKH, TKSK, serta perangkat kelurahan dan kecamatan, sehingga upaya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antar-aktor dapat terlaksana.

Pada faktor sarana dan prasarana, mekanisme distribusi bantuan yang dikerahkan dan fasilitas dasar operasional telah tersedia dan dapat diakses melalui para pendamping. Dukungan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif juga berkontribusi

pada kerangka pelaksanaan yang jelas, serta struktur organisasi dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan program dijalankan secara administratif.

3. Terdapat beberapa faktor-faktor juga yang masih menghambat dalam pemberdayaan yang dilakukan. Pada indikator pemanfaatan sumber daya lokal, kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi usaha belum merata dan masih bergantung kepada kapasitas individu serta pendampingan yang diberikan. Pada indikator pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pemahaman manajerial mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, dan administrasi usaha masih terbatas sehingga memengaruhi keberlanjutan usaha. Pada indikator motivasi dan kemauan, semangat perubahan belum selalu diikuti konsistensi dalam menjalankan usaha, terutama ketika menghadapi kendala pasar atau modal.

Pada indikator kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam kelompok belum sepenuhnya stabil karena adanya dinamika internal dan ketergantungan pada pendamping. Pada indikator sarana dan prasarana, keterbatasan alat pendukung pelatihan serta dukungan teknis usaha masih memengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas. Pada indikator kebijakan dan akses program, realisasi bantuan masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan prioritas program, sehingga tidak seluruh usulan pemberdayaan dapat diakomodasi. Selain itu, pada indikator organisasi dan administrasi, sistem pelaporan dan pengelolaan data masih bersifat berjenjang dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis.

## 4.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang dilakukan mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi fakir miskin serta faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan dalam mengurangi fakir miskin di Kota Semarang, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dilakukan penguatan agar proses pemberdayaan dapat berjalan lebih terarah. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tahapan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi fakir miskin di Kota Semarang perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek guna memperkuat internalisasi kemandirian dan keberlanjutan usaha, antara lain:
  - a. Dinas Sosial Kota Semarang perlu memperkuat tahap penyadaran karena pemahaman masyarakat masih berorientasi pada bantuan jangka pendek. Upaya yang diperlukan meliputi penguatan materi sosialisasi yang menekankan bahwa bantuan sosial yang diberikan bersifat sementara dan diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, pelaksanaan pembinaan rutin yang mengaitkan bantuan dengan kewajiban pengembangan usaha, serta penyampaian contoh konkret penerima manfaat yang berhasil mandiri. Dinas Sosial juga perlu memastikan bahwa program pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai informasi, tetapi sebagai dorongan perubahan pola pikir masyarakat untuk menuju usaha produktif.
  - b. Pendamping PKH dan TKSK perlu meningkatkan pendampingan pada aspek penerapan keterampilan karena pelaksanaan untuk dapat

menciptakan konsistensi. Pendamping perlu melakukan *monitoring* berkala terhadap perkembangan usaha, memberikan bimbingan teknis terkait pencatatan keuangan sederhana, serta membantu masyarakat menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi wilayah.

- c. Dinas Sosial bersama OPD teknis perlu memperkuat dukungan pelatihan manajemen usaha karena kendala pengelolaan usaha dan pemasaran masih memengaruhi keberlanjutan kegiatan ekonomi kelompok. Kerja sama lintas OPD dapat diarahkan pada pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan keuangan, pemisahan modal dan keuntungan, serta pengembangan akses pasar. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

2. Mengacu pada hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi fakir miskin di Kota Semarang, terdapat beberapa indikator penghambat dalam proses pemberdayaan. Adapun saran dan rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial Kota Semarang perlu memperkuat optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal yang ada karena kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi tersebut masih belum merata. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pemetaan potensi usaha berbasis wilayah, pendampingan yang lebih spesifik sesuai karakteristik usaha, serta penguatan kapasitas individu agar dapat mengolah sumber daya tersebut secara optimal.

- b. Pemerintah daerah bersama OPD teknis terkait perlu meningkatkan penguatan pengetahuan dan keterampilan manajerial masyarakat karena pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, dan administrasi usaha masih keterbatasan. Pelatihan lanjutan yang berfokus kepada peningkatan keterampilan dan skill masyarakat sesuai dengan kondisi dan sumber daya pendukung yang ada di sekitar mereka.
  - c. Pendamping PKH dan TKSK perlu memperkuat pembinaan pada aspek motivasi dan konsistensi usaha karena semangat perubahan belum selalu diikuti keberlanjutan tindakan ekonomi. Pendampingan dapat diarahkan pada kegiatan *monitoring* rutin, refleksi perkembangan usaha, serta penguatan mental kewirausahaan agar masyarakat tetap konsisten meskipun menghadapi kendala pasar atau modal.
3. Penelitian ini menemukan sebuah fenomena yang muncul di lapangan yang dapat membuka peluang bagi topik penelitian selanjutnya, yakni mengenai kebijakan pembatasan kepesertaan para penerima bantuan sosial yang menjadi maksimal lima tahun. Kebijakan yang baru diterapkan pada tahun 2025 ini memiliki potensi dalam mengubah dinamika ketergantungan serta motivasi fakir miskin secara signifikan. Penelitian mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap proses pemberdayaan yang dilakukan dalam jangka menengah perlu dilakukan agar dapat mengevaluasi efektivitasnya di dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi fakir miskin.